

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Dwiyanto. 2015. Buku. Manajemen Pelayanan Publik: Teori dan Aplikasi. ISSN: 978-602-386-012-3 Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Ani Suryani. 2019. Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha di Indonesia: *Book*. Rajawali Pers SN. 978-602-425-789. Jakarta
- David Levi-Faur, Jacint Jordana. 2018. *The Politics of Regulation: Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance*. Book Edward Elgar Publishing 978-1-84376-464-3 Vol. 1 PP. 352. Cheltenham
- Hendra Wijaya. 2019. Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah. Pustaka Setia Bandung SN-978-602-441-789-3. Bandung-Indonesia
- Joko Sutarto. 2018. Buku. Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Konsep dan Implementasi. Bina Aksara 978-602-432-456-7. Jakarta-Indonesia
- Miftah Thoha. 2017. Pelayanan Publik dan Good Governance. Rajawali Pers Vol. 4, 300 SN-978-979-769-789-1
- Moran Michael. 2018. *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press 978-0-19-954845-3 Vol. 1 PP. 896. Oxford.
- Norman Flynn. 2021. Public Sector Management. Sage Publications Vol. 6 PP. 320 SN-978-1-4462-0205-7. London
- Riant Nugrogo. 2017. Buku. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Elex Media Komputindo ISSN: 978-602-045-678-9. Jakarta
- Wahyudi Kumorotomo. 2016. Buku. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Pustaka Belajar ISBN: 978-602-229-123-4. Yogyakarta

Internet

- Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kudus. 2021. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kudus. <https://bawaslu.kuduskab.go.id/>
- Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus. 2023. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Kabupaten Kudus. <https://pmptsp.kuduskab.go.id/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2020. Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus. <https://menpan.go.id/>

Kementerian Investasi/BKPM. 2022. Implementasi Kebijakan Kemudahan Perizinan Berusaha di Daerah. <https://bkpm.go.id/>

Media Online Kabupaten Kudus. 2022. Peran Dinas PMPTSP dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudus. Kudus Media <https://kudusmedia.com/>

Jurnal

Al'afghani, Mohamad Mova; Bisariyadi. "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption in the Job Creation Law." *Jurnal Konstitusi* 18, no. Permits (2021).

Chahyaningsih, Angger Sigit Pramukti. "Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara." *Pustaka Yustisia, Yogyakarta*, 2016.

Firmansyah, Moch. "Penerapan Management Pengawasan Administratif Dalam Pemerintahan" (2018).

Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, and Deny Noer Wahid. "Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang." *National Multidisciplinary Sciences* 2, no. 4 (2023): 365–374.

Hariadi, David, Hesti Wulan, and Sonya Claudia Siwu. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 428–447.

Izhandri, Shandi, and Dessy Agustina Harahap. "OSS Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Sinar Grafika: Jakarta*, no. 1 (2018): 5.

J SIAHAAN. "Menurut Rollings Dan Ernest (2003) Tantangan Mengacu Pada Kompetisi Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Aktivitas Nya. Tantangan Dapat Menginspirasi Individu Untuk Memenangkan Kompetisi Dan Menyelesaikan Rintangan, Untuk Mencapai Sebuah Prestasi." *E-Journal Uajy.Ac.Id* (2007): 8–22.

JOHAN. *Perizinan Berusaha Didaerah Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2022. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT09-06-2022-130040.pdf>.

Laila, Umar, Ilham Hidayat, and R Kodrat. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kota Palopo" 4 (2024): 60–82.

- Lawrence M. Friedman, ed M Khozim. *Sistem Hukm, Perspektif Ilmu Sosial. Bandung Nusa Media*. Vol. 7, 2022.
- Nurin Nadhifah. “Analisis Implementasi Pengawasan Kerja Karyawan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada CV. Kubah Motif Di Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto).” *thesis, IAIN Kediri* (2020): 1–13.
- Nonet, P., & Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, n.d.
- Prajudi Atmosudirdjo. 2017. *Hukum Administrasi Negara*.
- Rahman, Tamsil. “Akibat Hukum Kebijakan Deregulasi Peningkatan Hak Atas Tanah Perumahan Terhadap Perjanjian Kpr Yang Memuat Klausula Pembebanan Hak Tanggungan.” *Law Reform* 6, no. 1 (2010): 1.
- Sabowo, Hudi Karno, and Saryana. “Tinjauan Yuridis Pembangunan Iklim Investasi Yang Kondusif Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4258–4268. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1250>.
- Soerjono Soekanto. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 4, 1982.
- Sushanty, Vera Rimbawani. “Hukum Perijinan” (2020): 3.
- Tyler, Tom R. “Why People Obey the Law.” *Why People Obey the Law*, no. December (2021): 1–302.
- Weber, Max. *The Theory Of Social And Economic Organization*. Vol. 4, 2015.

Peraturan

- Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. “Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis” (2021).
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. “Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik” (2021).
- Bupati Kudus. “Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus”. 2020
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. 2020
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”. 2021

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”. 2023

Wawancara

Harso Widodo, AP. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, “*Wawancara Pribadi, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Kudus*”, Kudus

Ariyanto, SH. Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Kudus, “*Wawancara Pribadi, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Kudus*”, Kudus

Budi Rahayu, SE. Subkoordinator Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal Kabupaten Kudus, “*Wawancara Pribadi, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Kudus*”, Kudus

Velani Khasbullah Sidiq, SH. Penata Kelola Perijinan Ahli Muda Kabupaten Kudus, “*Wawancara Pribadi, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Kudus*”, Kudus